



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon: (021) 85910031 (*Hunting*); Faksimilie: (021) 85906467; e-mail: investigasi@bpkp.go.id

Nomor : LKIN- 288/D6/02/2016

22 April 2016

Hal : Laporan Monitoring Kinerja

Deputi Bidang Investigasi s.d. Triwulan I Tahun 2016

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

BerIKSPt kami sampaikan hasil monitoring kinerja Deputi Bidang Investigasi s.d. Triwulan I Tahun 2016.

A. Simpulan

1. Realisasi *outcome* program pengawasan tercapai 82,41%.
2. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 152 penugasan atau 208,22% dari rencana sebanyak 73 penugasan.
3. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 58 OH atau 24,47% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
4. Realisasi anggaran sebesar Rp855.782.282,00 atau 23,40% dari rencana sebesar Rp3.657.450.000,00.

B. Capaian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Deputi Bidang Investigasi merencanakan pencapaian satu sasaran strategis dan satu sasaran program. Capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dan indikator kinerja sasaran program (IKSP) pengawasan s.d. triwulan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis dan Sasaran Program
s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)		Realisasi s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
			Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Sasaran Strategis Indeks Akuntabilitas Pngelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	Skala 1-5	1	0	0	0	0
2	Sasaran Program Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada APH, K/L/P/K	%	60	60	82,41	137,35	137,35

Uraian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) adalah sebagai berikut:

“Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, Kementerian, Lembaga, Korporasi”

Dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah, Deputi Bidang Investigasi menetapkan arah kebijakan peningkatan tata kelola atau *governance* yang memadai melalui pemantapan penerapan sistem pengendalian intern Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (K/L/P/K) serta peningkatan kapabilitas pengawasan intern dan sinergitas APIP. Sebagai upaya untuk penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan internal perlu ditingkatkan melalui upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terus menerus, karena pada kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta memberikan pemahaman dan pengetahuan atas *fraud* melalui pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, Deputi Bidang Investigasi meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Realisasi IKSP "*Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, Kementerian, Lembaga, Korporasi*" sebesar 82,41% atau mencapai 137,35% dari target sebesar 60%. Pengukuran IKSP dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yaitu 506 laporan dibandingkan dengan 614 permintaan penugasan.

Jumlah permintaan penugasan dan jumlah laporan yang diserahkan kepada APH/K/L/P/K sampai dengan triwulan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum, Kementerian, Lembaga, Korporasi

No.	Instansi	Permintaan	Laporan	Capaian (%)
	Pengamanan Keuangan Negara/Daerah			
1	Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif, Audit PKKN, PKA, Komputer Forensik)	489	479	97,96
	Sub Jumlah	489	479	97,96
	K/L/P/K			
1	Instansi Lain	38	4	10,53
2	Hambatan Kelancaran Pembangunan	13	6	46,15
	Sub Jumlah	51	10	19,61

